

**OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

(Studi Kasus Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Aplikasi SIPKD)
di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat)

TESIS

**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar
*Magister Chief Information Officer***



Oleh:
TRI BUDI DHARMA PUTRA
1200169

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2014

ABSTRACT

Tri Budi Dharma Putra, 2014. *Optimizing the Implementation of Financial company Stylists In Transportation Office of Communications and Informatics of West Sumatra Province. (Case Study Financial Management Information System (SIPKD) The Transport Department of Communication and Information Technology of West Sumatra Province).*

Department of Transportation, Communication and Information Technology of West Sumatra is a Unit Work Tools authority in charge of implementing decentralization and deconcentration tasks in the field of Transportation Land, Sea, Air, Communications and Informatics. In the implementation of organizational tasks have been utilizing information and communication technologies. One is the application of Financial Management Information System (SIPKD).

SIPKD is a web-based application developed by PT. USADI as the vendor who designed the model of integrated financial system. It should be arranged so that an executive management with the utilization of the information system, the problems do not occur in their implementation of the organization.

Standard Operating procedure is a management strategy of Communication and Information Technology Department of Transportation West Sumatra province, is expected to guide the implementation process of application receipts stylist finance company Financial Management Information System (SIPKD)

Keywords: optimization, financial management information system, standard operational procedures.

ABSTRAK

Tri Budi Dharma Putra, 2014. Optimalisasi Penyelenggaraan Penata Usahaan Keuangan Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat), Tesis Pasca Sarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat merupakan sebuah Satuan Perangkat Kerja yang bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Perhubungan Darat, Laut, Udara, Komunikasi dan Informatika. Dalam penyelenggaraan tugas-tugas organisasi sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya adalah aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

SIPKD merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh PT. USADI selaku vendor yang merancang model sistem keuangan yang terintegrasi. Akan tetapi perlu disusun suatu manajemen pelaksana agar dengan pemanfaatan sistem informasi tersebut, tidak terjadi permasalahan-permasalahan dalam implementasinya pada organisasi.

Standar Operasional prosedur merupakan strategi manajemen Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, diharapkan sebagai pedoman terhadap proses penyelenggaraan penata usahaan keuangan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Kata Kunci: optimalisasi, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, standar operasional prosedur.

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Mahasiswa : **Tri Budi Dharma Putra**
NIM : 1200169
Program Studi : Magister (S2) CIO

MENYETUJUI

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Kasman Rukun, M.Pd
NIP. 19550921 198303 1 004

Dr. M. Giatman, MSIE
NIP. 19590121 198903 1 002

PENGESAHAN

Dekan,

Ketua Pascasarjana FT,

Prof. Ganefri, Ph.D
NIP. 19631217 198903 1 003

Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed
NIP. 19520822 197710 1 001

PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER
PROGRAM CHIEF INFORMATION OFFICER

Nama	Tanda Tangan
<u>Prof. Dr. Kasman Rukun, M.Pd</u> (Ketua/Pembimbing I/Penguji)	_____
<u>Dr. M. Giatman, MSIE</u> (Sekretaris/Pembimbing II/Penguji)	_____
<u>Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed</u> (Anggota)	_____
<u>Muhammad Adri, S.Pd, M.T</u> (Anggota)	_____
<u>Drs. Denny Kurniadi, M.Kom</u> (Anggota)	_____

Padang, Maret 2014
Program Magister *Chief Information Officer*
Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang Ketua,

Dr. Fahmi Rizal, M.Pd, M.T
NIP. 19591204 198503 1 004

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul “Optimalisasi Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Sistem Informasi Keuangan Daerah (Aplikasi SIPKD) di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Maret 2014
Saya yang menyatakan

Tri Budi Dharma Putra
NIM. 1200169

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat-Nya yang tak terhingga, syalawat dan salam teruntuk junjungan alam yakni nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Optimalisasi Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Sistem Informasi Keuangan Daerah (Aplikasi SIPKD) di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat)”.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Magister *Chief Information Officer* Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

Penelitian tesis ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Kasman Rukun, M.Pd selaku pembimbing I
2. Dr. M. Giatman, MSI selaku pembimbing II
3. Prof. Ganefri, Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik
4. Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed selaku ketua program Pascasarjana FT
5. Muhammad Adri, S.Pd, MT selaku Ketua Prodi Magister CIO
6. Teman-teman seperjuangan Program Magister *Chief Information Officer* Fakultas Teknik Universitas Negeri yang telah memberikan bantuan moril dalam suka dan duka bersama.
7. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa tesis yang disusun ini masih memiliki banyak kekurangan. Karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan tesis yang akan datang.

Terakhir, penulis menyampaikan harapan semoga penelitian sederhana yang disusun ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.

Padang, Maret 2014

Peneliti

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN AKHIR TESIS	i
PERSETUJUAN KOMISI	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan	6
H. Pentingnya Pengembangan	7
I. Asumsi Dan Keterbatasan Pengembangan	7
J. Sasaran Penelitian	7
K. Definisi Operasional	8
BAB II. LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Teori	9
1. Optimalisasi	9
2. Pengelolaan Keuangan	11
3. Sistem Informasi Keuangan Daerah	12
4. Pengelolaan keuangan pada Dinas Perhubungan	

Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat	17
5. <i>GAP Analisis</i>	19
6. Pemodelan	20
B. Kajian Penelitian yang Relevan	21
C. Kerangka Pemikiran	21
D. Pertanyaan Penelitian	22
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Prosedur Pengembangan	23
C. Tempat dan Waktu	24
D. Subjek Penelitian	25
E. Jenis Data	25
F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan	26
1. Observasi	26
2. Wawancara	27
3. Studi Dokumentasi	28
G. Subjek Pengumpulan Data	28
H. Teknik Analisis Data	29
1. Metode Analisis	29
2. Alat Bantu Analisis	31
3. Strategi Pengembangan	31
I. Instrumen Uji Coba Produk	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Profil Organisasi	33
2. Landasan Hukum	34
3. Visi Misi	34
4. Tujuan Organisasi	35
5. Sasaran	36
6. Tugas Pokok dan Fungsi	38
7. Struktur Organisasi	38

8. Ruang Lingkup Penelitian	38
9. Kondisi SIPKD saat ini	39
a. Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan	39
b. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	40
c. Penatausahaan Keuangan	40
d. Gap Analisis	42
B. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Keuangan	44
1. Mengidentifikasi Aktor-Aktor (<i>Stakeholder</i>) yang terlibat lansung dalam Lingkungan Penata usahaan Keuangan Menggunakan SIPKD	44
2. Memodelkan Aktifitas Aktor-aktor sesuai dengan Fungsi	47
C. Analisis	57
D. Produk	60
E. Uji Coba Produk	61
F. Revisi Produk	62
G. Pembahasan	62
BAB V. KESIMPULAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR RUJUKAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jawal Penelitian	25
2. Gap Analysis	42
3. Identifikasi Aktor Penyelenggaraan Keuangan pada Dishub Kominfo Prov. Sumbar	45
4. Aktivitas Aktor-aktor Fungsi Penganggaran	48
5. Aktivitas Aktor-aktor Pengajuan UP/GU/TU	49
6. Aktivitas Aktor-aktor Pengajuan Belanja Tidak Langsung	50
7. Aktivitas Aktor-aktor Pengajuan Belanja Langsung	51
8. Aktivitas Aktor-aktor Pengajuan Belanja Gaji/Tunjada/Insentif	53
9. Aktivitas Aktor-aktor Pengajuan Belanja Tidak Langsung	50
10. Aktivitas Aktor-aktor Penerimaan Langsung	55
11. Aktivitas Aktor-aktor Pelaporan dan Pertanggung Jawaban	56
12. Model Produk	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Interface SIPKD	13
2. Alur Kebijakan Pengelolaan Keuangan	14
3. Infrastruktur SIPKD	15
4. Hubungan SIPKD dengan DJPKD	15
5. Siklus Penatausahaan Keuangan Daerah	18
6. Kerangka Berfikir	22
7. Diagram Alir Penelitian	24
8. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan	40
9. Interaksi Aktifitas Penganggaran	48
10. Interaksi Aktifitas Pengajuan	50
11. Interaksi Aktifitas Pengajuan Belanja Tidak Langsung	51
12. Interaksi Aktifitas Pengajuan LS Pihak Ke III	53
13. Interaksi Aktifitas Pengajuan Gaji/Tunjada/Insentif	55
14. Interaksi Aktifitas Penerimaan / Retribusi	56
15. Interaksi Aktifitas Pelaporan dan Pertanggung Jawaban	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat	69
2. Stanadar Operatrstruktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat	70
3. Tabulasi Validasi Model	86
4. Tabualasi Kuissoner Uji Pratikalitas	87
5. Tabulasi Kuissoner Uji Efektivitas	88
6. Lembaran Observasi Data Informasi	89
7. Lembaran Observasi Dokumentasi	90
8. Intrumen Wawancara Top Manager	91
9. Intrumen Wawancara Midle Manager	96
10. Intrumen Wawancara First line Manager	101
11. Kuissoner Uji Produk	105
12. Kuissoner Uji Model	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi di dunia khususnya di negara Indonesia sangatlah cepat, terutama dibidang teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan suatu acuan bagi setiap negara berkembang termasuk negara Indonesia dalam menghadapi perubahan pada era globalisasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengolahan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Informasi dan pengetahuan dapat diciptakan secara cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (mediasi) apapun.

Kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan yang serba cepat dan mudah melalui teknologi digital menjadi suatu tuntutan. Penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan dapat mempermudah akses antara masyarakat dengan pemerintah, tidak hanya melalui komunikasi satu arah saja dimana pemerintah dapat mempublikasikan data dan informasi yang dimilikinya. Akan tetapi juga komunikasi dua arah, yaitu masyarakat dapat menerima dari pemerintah dan memberikan informasi kepada pemerintah. Adanya transparansi antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin dalam ruang lingkup demokrasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk mewujudkan praktek pemerintahan yang lebih efisien dan efektif.

Kebijakan penerapan *Electronic Government (e-Government)* merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Perkembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi komunikasi (TIK), diiringi semakin meluasnya

penggunaan Internet sebagai akses ke dunia maya, telah mendorong suatu perubahan yang global. Perubahan pemanfaatan teknologi informasi tersebut selain dalam cara berkomunikasi dan menikmati hiburan, juga dalam pemerintahan.

Kebijakan penerapan *e-Government* dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi. Kebijakan penerapan *e-Government* dikembangkan untuk membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah secara terpadu. Pemanfaatan TIK tersebut meliputi pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Keberadaan kebijakan penerapan *e-Government* merupakan salah satu infrastruktur penting dalam pemerintahan. Selain itu, kebijakan penerapan *e-Government* merupakan kebutuhan sekaligus tuntutan publik yang menginginkan informasi secara akurat, transparan serta *accountable*.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan *e- Government* yang berisi:

1. Bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.
2. Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-Government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e- government.
4. Bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan

e-Government secara nasional.

Pada intinya, Inpres tersebut membahas tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Hal ini didasarkan pada perkembangan teknologi informasi di dunia yang demikian pesatnya, sehingga Indonesia ditakutkan akan ketinggalan dari negara-negara lain dalam penerapan sistem informasi pada bidang pemerintahan.

Salah satu implementasi *e-Government* di pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Aplikasi SIPKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadminstrasikan, serta mengelola data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggung jawaban pemerintah daerah (PP No.56/2005). Berdasarkan penjelasan dari *web* resmi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Aplikasi SIPKD sendiri merupakan aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada azas efisien, ekonomis, efektif, transparan, *akuntabel*, dan *auditable*. Dalam aplikasi SIPKD ini berisi data-data gaji pegawai, pengeluaran pemerintah, pendapatan pemerintah serta informasi lainnya yang terkait dengan keuangan daerah. Adapun pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, aplikasi induk SIPKD berada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) selaku server dan *admin control*.

Berdasarkan observasi awal dan hasil wawancara aplikasi SIPKD telah diimplementasikan semenjak tahun 2008 pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berbasis pada TIK, yang mana pada awalnya hanya untuk mengentrikan data anggaran belanja pada SKPD, namun dari tahun ke tahun dikembangkan secara terus menerus dan terbukti sudah bisa mencapai laporan keuangan akhir tahun, akan tetapi implementasi aplikasi SIPKD di SKPD yang ada pada

pemerintahan pada prinsipnya sampai saat ini hanya sebagai alat bantu dalam memudahkan penginputan data keuangan dan laporan, sehingga tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya sebagai perangkat yang dapat menciptakan tertib administrasi keuangan dan lintas koordinasi pengelolaan keuangan berbasis TIK baik antar bidang, ataupun organisasi induk, hal ini dikarenakan tidak adanya rumusan kebijakan terhadap prosedur pengelolaan yang terstruktur pada internal organisasi, sehingga semua aktivitas pengelolaan keuangan mengacu pada instruksi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat merupakan SKPD yang merupakan bagian dari Pemerintahan Provinsi yang secara tidak langsung juga menerapkan aplikasi SIPKD dalam pengelolaan keuangan organisasi sampai saat ini. Adapun berdasarkan observasi yang didapat pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat banyak permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan penatausahaan keuangan. Permasalahan tersebut tidak terletak pada aplikasi SIPKD, tapi lebih kepada manajemen pemrosesan pra penginputan dokumen anggaran.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa *operator* aplikasi SIPKD pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang telah dilakukan saat observasi awal pada bulan Juli 2013 didapat permasalahan sebagai berikut:

1. Sering terjadi keterlambatan penginputan Dokumen Penggunaan Anggaran
2. Sering terjadi pergeseran dan perubahan anggaran
3. Keterlambatan pelaporan anggaran.
4. Belum adanya kebijakan terhadap mekanisme prosedur pengelolaan keuangan melalui aplikasi SIPKD di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
5. Terlambatnya penyampaian perencanaan anggaran ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang merupakan *server* induk aplikasi SIPKD.

6. Terlambatnya pertanggungjawaban penggunaan anggaran ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang merupakan server induk aplikasi SIPKD.

Oleh karenanya perlu solusi yang tepat dalam memecahkan permasalahan tersebut dan dapat memperbaiki kondisi yang saat ini tidak kondusif pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini dalam menyusun manajemen operasional penatausahaan keuangan untuk mendukung terlaksananya aplikasi SIPKD.

Penatausahaan merupakan bagian dari tata kelola yang lebih mengatur secara spesifik terhadap aktivitas tertentu serta dilaksanakan oleh bidang tertentu dan berpedoman pada aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, sedangkan untuk tata kelola mengatur secara umum keseluruhan aktivitas dari seluruh bidang yang terkait didalamnya yang mana merupakan rangkaian proses, aturan serta kebijakan yang menjadi dasar pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi untuk dijadikan arahan bagi manajemen dalam menjalankan fungsi organisasi agar lebih efektif dan efisien (Miftah Farid, 2013) , dalam hal ini Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah, baik menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampaiannya maupun Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah kemudian disempurnakan dengan terbitnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Penatausahaan keuangan daerah mencakup asas umum penatausahaan keuangan, pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran serta penatausahaan pendanaan dan tugas pembantuan.

Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan suatu kajian dengan menggunakan alat bantu *gap analysis* atau analisis kesenjangan juga merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam tahapan perencanaan maupun tahapan evaluasi kinerja. Metode ini merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam pengelolaan manajemen internal

suatu lembaga. Secara harafiah kata “*gap*” mengindikasikan adanya suatu perbedaan (*disparity*) antara satu hal dengan hal lainnya (Bappenas, 2009), tujuannya sebagai evaluasi terhadap hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam pengembangan terkait penatausahaan keuangan.

Selanjutnya dilakukan perancangan permodelan terhadap petunjuk operasional dengan menggunakan permodelan bisnis dapat menggunakan *Unified Modeling Language* (UML). Menurut Barclay & savage (2004) UML merupakan bahasa standar yang digunakan untuk menentukan *visualisasi*, membangun dan men-dokumentasikan *artifact* sistem perangkat lunak (IBM, 1981), dalam hal ini yang digunakan adalah *use case* dan *activity diagram* karena Permodelan dengan UML berarti menggambarkan yang ada dalam dunia nyata kebentuk yang dapat dipahami dengan menggunakan notasi, dan tidak memiliki sebuah tahapan proses (Syafrizal, 2013), kemudian untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu kepada model kerangka yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten / Kota yang merupakan pedoman penyusunan SOP yang didalamnya telah disediakan petunjuk perancangan, form isian, simbol-simbol dan garis arah, sehingga mempermudah dalam perancangannya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengambil judul Tesis “**Optimalisasi Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Aplikasi SIPKD) di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat)**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian pendahuluan di atas berdasarkan observasi awal terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Sering terjadi keterlambatan penginputan Dokumen Penggunaan Anggaran
2. Sering terjadi pergeseran dan perubahan anggaran

3. Keterlambatan pelaporan anggaran.
4. Belum adanya kebijakan terhadap mekanisme prosedur pengelolaan keuangan melalui aplikasi SIPKD di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
5. Terlambatnya penyampaian perencanaan dan laporan keuangan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang merupakan server induk aplikasi SIPKD.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang muncul di atas, untuk mengetahui kelemahan yang ada pada penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, permasalahan hanya berfokus kepada:

1. Strategi optimalisasi pengelolaan aplikasi SIPKD di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.
2. Optimalisasi penatausahaan keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Strategi optimalisasi pengelolaan aplikasi SIPKD di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana merumuskan langkah-langkah optimalisasi penatausahaan keuangan terhadap implementasi aplikasi SIPKD di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat?

E. Tujuan Pengembangan

1. Menyusun strategi optimalisasi penatausahaan keuangan terhadap penerapan aplikasi SIPKD di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat?

2. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) penatausahaan keuangan terhadap penerapan aplikasi SIPKD di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat?

F. Spesifikasi Produk yang Diharapkan

Produk yang dibuat berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penyelenggaraan penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi SIPKD di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera yang merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karenanya perlu pengaturan dan manajemen yang baik terhadap implementasinya. Adapun spesifikasi produk yang diharapkan antara lain:

1. Pengelolaan keuangan yang efektif
2. Pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam aplikasi SIPKD
3. Manajemen pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur dan terarah.
4. Pengelolaan keuangan yang tertib administrasi
5. Mengembalikan fungsi pengelola keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam lingkungan SIPKD.

G. Manfaat Pengembangan

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengatur aktifitas penyelenggaraan penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi SIPKD di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap upaya efektifitas penyelenggaraan penatausahaan keuangan pada aplikasi SIPKD di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.
3. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi pengembangan manajemen strategis organisasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

H. Analisis Dan Keterbatasan Pengembangan

Pengembangan penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi SIPKD di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat diperlukan komitmen dari *stake holder* yang terlibat di dalamnya oleh karenanya dalam pra implementasi aplikasi ini diperlukan suatu langkah-langkah strategis untuk merubah pola pikir dan perilaku organisasi.

I. Pentingnya Pengembangan

Pengembangan optimalisasi penyelenggaraan penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi SIPKD suatu upaya melaksanakan program pemerintah dalam mewujudkan *e-Government* dan diharapkan dapat memberikan mamfaat terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, sehingga tercipta kualitas pengelolaan keuangan yang tertib dan terstruktur.

J. Sasaran Penelitian

Penelitian diharapkan dapat mencapai sasaran sebagai berikut :

1. Usulan terhadap penataan manajemen keuangan dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi SIPKD.
2. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan keuangan sebagai pedoman dalam operasional penyelenggaraan keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

K. Definisi Operasional

- 1 Optimalisasi penyelenggaraan penatausahaan keuangan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas dan efektifitas manajemen keuangan agar dapat terlaksana dengan tujuan yang diinginkan
- 2 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Tingkat I yang mempunyai ruang lingkup kewenangan pada bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukan tata kelola manajemen dalam pelaksanaan operasional penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi SIPKD pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan strategi terhadap keberlangsungan organisasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman pelaksanaan dalam penatausahaan keuangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan dapat merubah pola manajemen keuangan kearah yang terstruktur, efektif dan efisiensi.

B. Implikasi

Sebagai suatu penelitian pengembangan yang pada prinsipnya memberikan implikasi terhadap subjek yang diteliti, dalam hal ini pengembangan dapat memberikan kontribusi dan mamfaat terhadap keberlangsungan dalam pelaksanaan proses organisasi. Selain itu produk yang dihasilkan merupakan pedoman operasional penata usahaan keuangan sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan terstruktur dan terarah.

Adapun dampak utama yang diharapkan dari pengembangan ini antara lain:

1. Dapat terlaksananya penata usahaan keuangan yang praktis dan efektif yang berbasis aplikasi SIPKD
2. Merubah pola pikir serta budaya organisasi terhadap pemamfaatan TIK sebagai alat bantu menjadi perangkat yang mampu mewujudkan tujuan organisasi.
3. Terlaksananya tata kelola TIK yang baik dalam organisasi.

C. Saran

Untuk menjamin produk yang dilaksanakan dapat terlaksana , berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Penata usahaan keuangan menggunakan aplikasi SIPKD pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
2. Tatakelola harus diawali dengan perencanaan yang matang oleh manajemen puncak dengan cara membuat rencana kegiatan.
3. Implementasi produk dapat dilaksanakan secara bertahap.
4. Perlu dilakukan pengujian-pengujian lebih lanjut atas produk yang dihasilkan, agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ada dan dapat mengakomodasi dinamika yang terjadi di tahapan pelaksanaan dan fleksibel terhadap kemungkinan perubahan aturan dan mekanisme manajemen penta usahaan keuangan.
5. Perlu dilakukan pengembangan selanjutnya untuk diperolehnya penyempurnaan sesuaikan dengan dinamika yang berkembang diorganisasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Arthur A. Thompson, Jr., A. J. Strickland III, and John E. Gamble. 2008. *Crafting & Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage*, International Edition, 16th ed, McGraw-Hill, United States of America.
- Bradford, Robert. W., Duncan, Peter. J., Tarcy, Brian. 2007. *Simplified Strategic Planning. Internet Center for Management and Business Administration*, Inc.
- Cohen M, John and Peterson B, Stephen. 2012. *Administrative Decentralization (Strategies for Developing Countries)*. Kumarian Press: USA.
- Copyright. 2012. PT. Usadi Sistemindo Intermatika. Jakarta.
- David, R. Fred. 2012). *Manajemen Strategis Konsep*. Edisi Dua Belas. Jakarta. Salemba Empat.
- Darono, Agung (17-18 Juni 2011). *Chief Information Officer Dan Perannya Dalam Aktualisasi Manajemen Strategis*. Diambil pada tanggal 14 Juni 2012 di <http://journal.uui.ac.id/index.php/Snati/article/viewFile/2165/1992>
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan *e- Government*. Jakarta.
- Jurnal Miftah Farid. 2013. Pembuatan SOP Menurut Permenpan No.52 Tahun 2011 Dengan *Best Practice Cobit 5 Dan Itil V*. Intitut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.
- Nawawi, Hadari. 2000. *Manajemen Stratejik Organisasi Non Profit Di bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi Di Bidang Pendidikan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Poerwandari, E. Kristi. 1998. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2004 tentang Kewenangan. Jakarta.
- Peraturan Daerah No.4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan. Jakarta.